

RELASI ANTAR ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2014-2019 DPRD KAB. PARIGI MOUTONG TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Fikar Adi Samzul¹, Muhammad², Ariana Yunus³, Abd. Rahman Makkatuo⁴, Mulawarman⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ftotonk@gmail.com¹

alhamid.muhammad41@gmail.com²

ana.yun@yahoo.com³

abd.rahmanmakkatuo@gmail.com⁴

mulawarman1403@gmail.com⁵

Abstract

This research is about the relations between DPRD members and the Democratic Party faction for the 2014–2019 period in Parigi Moutong Regency. The purpose of this study was to find out and analyze how the relations between members of the Democratic Party faction for the period 2014–2019 (DPRD Parigi Moutong Regency) affected decision making. The type of research used was qualitative research. The theories used in this thesis are: (1) the theory of power relations; and (2) the concept of decision making. The sources of data in this study are primary and secondary. The data analysis method used is a descriptive analysis of the results of the interviews. From the research conducted by the author, it shows that there was an internal conflict that occurred within the Democratic party faction of Parigi Moutong district, reflecting that the formation of a faction in the DPRD did not go as expected. This conflict occurred due to an internal conflict within the Democratic Party ahead of the 2018 Parigi Moutong district regional head election, which then impacted relations between members of the faction. Relations between members of the Democrat party faction in the Parigi Moutong district DPRD at the start of Mr. Haris Lasimpara's replacement as chairman of the DPC had an impact on discordant communication between faction members. As a result, channeling people's aspirations is hampered, particularly for Democratic party constituents in each faction member's constituency. In addition, after the 2018 Parigi Moutong district head election, the regent who was elected was no longer a supporter of the Democratic Party. As a result, the Democratic Party is not adequately accommodated by the elected regent in channeling some of its aspirations, particularly in constituent areas.

Keywords: member relations, DPRD faction, Democratic Party

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia telah lama dipilih sebagai alternatif dalam menata masyarakat. Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi. Namun

dalam perjalanan sejarah Indonesia, perwujudan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pemerintahan presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan konsep demokrasi terpimpin.

Kemenangan partai Demokrat pada tahun 2004, kemudian berlanjut ditahun 2009, Demokrat menjadi partai yang diidolakan oleh tokoh-tokoh politik lokal hingga struktur Partai Demokrat terbentuk ke berbagai kabupaten/kota termasuk ke Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan penelusuran oleh peneliti, pada tanggal 7 Mei 2002 Partai Demokrat resmi terbentuk di Kabupaten Parigi Moutong. Abdul Haris Lasimpara ditunjuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat pertama di Kabupaten Parigi Moutong. Di pemilu tahun 2004, Abdul Haris Lasimpara untuk pertama kalinya maju sebagai calon legislatif (caleg) di kabupaten Parigi Moutong. Pada pemilihan legislatif tersebut, Abdul Haris Lasimpara berhasil mendapatkan suara terbanyak dan juga meloloskan satu kader lainnya dari partai Demokrat yaitu Gede Sudewo.

Tren positif partai Demokrat di tingkat nasional juga dirasakan kader-kadernya di tingkat lokal. Di kabupaten Parigi Moutong, partai Demokrat berhasil mengantarkan lima calon legislatifnya masuk di dalam parlemen kabupaten Parigi Moutong dan sudah membentuk fraksi sendiri yaitu fraksi partai Demokrat. Keberhasilan partai Demokrat memperoleh 5 kursi membuat Abdul Haris Lasimpara di periode keduanya menduduki kursi wakil ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten Parigi Moutong. Adapun Anggota legislatif terpilih yang berasal dari partai Demokrat Parigi Moutong adalah Abdul Haris Lasimpara, H. Suardi, Adiyana Janji, Imam Muslimin dan Made Sudarsana.

Di pemilihan umum 2014, partai Demokrat tetap mendapatkan 5 kursi yang mengantarkan kembali Abdul Haris Lasimpara sebagai wakil ketua DPRD dan tetap membentuk fraksi sendiri dalam parlemen. Calon legislatif yang terpilih pada periode 2014 masih sama seperti periode sebelumnya yaitu Abdul Haris Lasimpara, H.

Suardi, Adiyana Janji, Imam Muslimin dan Made Sudarsana.

Terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Parigi Moutong selama 3 periode, Abdul Haris Lasimpara berinisiatif untuk mencalonkan diri maju sebagai bakal calon bupati di pilkada daerah kabupaten Parigi Moutong tahun 2018. Dalam proses mencari koalisi partai pengusung, Abdul Haris Lasimpara mendapatkan kendala dari internal partai Demokrat dengan munculnya Amrullah Ahmadali yang juga ingin mencalonkan sebagai calon bupati kabupaten Parigi Moutong. Amrullah Ahmadali adalah anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dari partai Demokrat dan juga merupakan salah satu kader terbaik partai. Jalan terjal yang di lalui Abdul Haris Lasimpara saat mencari rekomendasi dari partai Demokrat. Dua kader terbaik yang sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati tentunya tidak mudah untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Konflik internal pun terjadi di partai Demokrat Parigi Moutong dalam menentukan calon yang ingin di usung dan diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon bupati. Setelah kekisruhan yang terjadi di dalam internal partai Demokrat, menghasilkan Amrullah Ahmadi mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon bupati kabupaten Parigi Moutong sedangkan Abdul Haris Lasimpara gagal maju sebagai bakal calon bupati.

Kekisruhan yang terjadi tidak cukup sampai disitu, posisi Abdul Haris Lasimpara sebagai ketua DPC partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong selama tiga periode juga di lengserkan dan digantikan oleh PLT Nur Dg Rahmatu. Kegaduan kepengurusan partai Demokrat seusai di tinggalkan oleh Abdul Haris Lasimpara berdampak pada fraksi dan kader-kader yang masih menjabat di DPRD. Mereka bagaikan “anak ayam yang ditinggal induknya” yang tidak memiliki arah untuk pertarungan politik selanjutnya di pemilu tahun 2019. Kegaduan yang terjadi dalam

internal partai, membuat arah politik tidak terarah dengan baik.

Pemilihan legislatif tahun 2019 awal dari ke hancuran partai Demokrat di kabupaten Parigi Moutong. Di masa penjangkaran caleg untuk memenuhi kuota partai Demokrat tidak melalui proses mekanisme yang ada. PLT ketua DPC partai Demokrat menunjuk langsung caleg-caleg untuk memenuhi kuota per dapil. Yang lebih fatalnya PLT ketua DPC memilih pendatang baru untuk mengisi kuota per dapil partai Demokrat dan tidak memperhitungkan basis suara caleg yang dipilih sebelum menempatkannya di dapil tersebut. Caleg dari dapil 1 dipindahkan ke dapil 5, sehingga caleg yang dipilih tidak memiliki basis suara di dapil tersebut. Begitupula dengan caleg dapil 3 yang dipindahkan ke dapil 2. Strategi politik yang dilakukan tersebut membuat caleg partai Demokrat tidak lagi mendapatkan 5 kursi.

Perengkingan suara individu caleg partai Demokrat yang pernah menjabat di periode sebelumnya cukup besar. Bahkan perolehan suaranya diatas caleg-caleg dari partai lain yang mendapatkan kursi. Tetapi untuk perolehan suara partai, partai Demokrat ketinggalan jauh dari partai-partai lainnya sehingga hanya mendapatkan 2 kursi dari semua dapil.

Pemilihan legislatif tahun 2019 minyisakan satu caleg Incumbent dari fraksi partai Demokrat yaitu H Suardi dan memunculkan caleg baru yang bernama Rusno AHT. Kehancuran fraksi partai Demokrat di pemilihan legislatif 2019 disebabkan oleh PLT DPC partai Demokrat yang tidak optimal mengurus partai dan lebih memilih caleg-caleg pendatang baru untuk di tempatkan di suatu dapil.

Dengan melihat kekisruhan yang terjadi diatas, tentunya berdampak pada fraksi Demokrat yang berada di DPRD. Tugas dan fungsi fraksi tentunya akan terganggu dengan adanya masalah tersebut. Konflik yang terjadi sebelum pemilihan bupati tahun 2018 tersebut

berdampak pada relasi anggota DPRD di fraksi Partai Demokrat. Pasca pemilihan Bupati kabupaten Parigi Muotong, Abdul Haris Lasimpara mulai mengambil keputusan sendiri dalam fraksi dan tidak mendengarkan keempat anggota lainnya. Selain itu, Abdul Haris Lasimpara juga tidak lagi mengurus partai Demokrat menjelang pemilihan legislatif tahun 2019. Hal tersebut berdampak pada proses penjangkaran caleg yang tidak optimal dan dilakukan dua minggu sebelum penutupan pendaftaran caleg.

Sebagai wadah untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Kab. Parigi Moutong yang berasal dari partai Demokrat tentu saja terjadi persaingan kuasa satu sama lain seperti yang terjadi dipenjelasan sebelumnya. Fraksi partai Demokrat sebagai lembaga tentu saja memiliki aturan, struktur dan susunan-susunan dalam prakteknya. Untuk menguraikan relasi anggota yang terbangun di fraksi partai Demokrat, dalam penelitian ini penulis menelusuri Relasi Anggota DPRD di Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 Di Kabupaten Parigi Moutong.

KAJIAN LITERATUR

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan beberapa tulisan terdahulu yang membahas mengenai Relasi Anggota DPRD dalam Fraksi. Pertama, Jurnal yang ditulis Anin Khoirunnisa yang berjudul Relasi Kekuasaan di Kalangan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di pemilihan legislatif yang dilakukan tahun 2009 sampai 2014 telah terpenuhi. Namun ada beberapa parpol yang tidak mencerminkan keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam pembagian struktur atau jabatan di DPRD Kota Surabaya, anggota DPRD perempuan masih mendapat

posisi yang strategis. Hal tersebut di pengaruhi oleh relasi yang terbangun antar caleg perempuan yang ada dalam parlemen DPRD kota Surabaya.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Agus Sudarmansyah membahas tentang Peran Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi menyerap, meyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat harus di maksimalkan. Cara yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD adalah dengan memanfaatkan masa reses dan kunjungan kerja untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat terutama yang berupa pada daerah pemilihannya. Komunikasi antara anggota legislatif dan konstituen harus tetap dijaga agar tidak terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Irwan Sardi dengan judul Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nagka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari. Penelitian yang dilakukan membahas mengenai relasi yang tidak seimbang sehingga pembuatan kebijakan dan wacana pembukaan lahan kelapa sawit menuai kontroversi. Yang terjadi dilapangan harusnya adalah wujud dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar wilayah kebun kelapa sawit.

Ketiga penelitian di atas dilakukan perbandingan, sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaannya mengenai penelitian yang dilakukan tentang relasi kuasa anggota DPRD dalam fraksi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah tulisan ini membahas mengenai relasi anggota legislatif terhadap eksternal partai dalam parlemen.

Sedangkan penelitian ini lebih melihat bagaimana relasi kekuasaan yang terjadi di internal partai demokrat kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana konflik yang terjadi di dalam fraksi partai Demokrat DPRD kabupaten Parigi Moutong.

Selain penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa teori untuk menganalisis masalah yang diteliti. Berikut ini teori yang digunakan oleh penulis:

1. Teori Relasi Kuasa

Kekuasaan bukanlah fungsi dominasi kelas berdasarkan dominasi ekonomi atau manipulasi ideologis seperti Marx. Dan kekuasaan tidak dimiliki oleh karisma yang diungkapkan Weber. Namun, dalam definisi positif kekuasaan, kekuasaan adalah seluruh struktur perilaku yang menghambat dan mendorong perilaku lain melalui bujukan, rangsangan, rayuan, paksaan, dan larangan.

Kekuasaan bukanlah institusi, bukan struktur, atau kekuasaan yang dimiliki, melainkan nama yang diberikan kepada situasi strategis masyarakat yang kompleks. Kekuasaan juga beragam, didistribusikan seperti jaringan, dan produktif, dan kekuasaan lahir dari perbedaan dan ketidaksetaraan.¹

Pemikiran Foucault tentang kontrol penciptaan diskursus dan bekerjanya kekuasaan (power) pada pengetahuan sangat membantu para teoritis dan praktisi perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktek pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan karena tanpa menganalisis pembangunan sebagai suatu diskursus, maka akan sulit untuk memahami bagaimana.

Kontribusi terbesar Foucault terhadap teori dan praktik perubahan sosial adalah membuat teori ini lebih peka terhadap

¹ Martua Pahalaning Wandalibrata. 2019. Kajian Metafisika "Relasi Kuasa" Dalam Pemikiran Michel

Foucault. *JURNAL CAKRAWARTI*, Vol. 02 No. 01. Hlm. 66

hubungan antara kekuasaan dan dominasi dan untuk menyadarkan kita tentang bagaimana hubungan kekuasaan terjalin dalam semua aspek kehidupan dan kehidupan pribadi. Realitas umum ilmu-ilmu sosial, yang cenderung mengabaikan “kekuasaan” dalam dunia ilmiah, dan anggapan bahwa pengetahuan itu netral, objektif, dan polos. Foucault menyangkal kenyataan karena hubungan kekuasaan ada di setiap aspek kehidupan, dan dengan demikian kecenderungan untuk melihat kekuasaan hanya terkonsentrasi di negara atau kelas. Konsep kekuasaan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap aspek dan posisi sentral kekuasaan, bentuk perjuangan batas, dan keragaman kekuasaan.

Dari sudut pandang Michel Foucault, kekuasaan adalah dimensi hubungan. Di mana ada hubungan, di situ ada kekuatan. Kekuasaan ada di mana-mana. Keinginan untuk berkuasa sama dengan keinginan untuk kebenaran. Pada dasarnya, kekuasaan tidak terbatas pada pemimpin suatu lembaga atau masyarakat, tetapi meresap dalam berbagai hubungan. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki dan dijalankan sejauh terdapat banyak posisi strategis yang saling terkait. Foucault memahami kekuasaan dengan cara yang lebih orisinal. Foucault meneliti kekuatan yang lebih besar dari individu sebagai subjek dalam skala yang lebih kecil.²

2. Konsep Pengambilan Keputusan

Menurut Mirriam Budiardjo, dalam konteks pengambilan keputusan yang mengatakan bahwa keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sejalan dengan Joys Michel “collective decision making or the making of public policies for entire society”. Pendapat ini sama juga dengan pendapat Karl W. Deutsch dalam bukunya *Politics and Government, How people decide their Fate*

menyatakan: “Politics is the making of decisions by publics means”. Dengan demikian, konsep kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan tujuan, serta cara dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan pengaturan berarti pengaturan dan alat dapat digunakan, sedangkan metode ini sesuai dengan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa contohnya adalah di mana dari adalah kebijakan pemerintah, termasuk menjaga ketertiban umum, memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai cara, menyelenggarakan berbagai kegiatan dan organisasi kesejahteraan yang bermanfaat bagi rakyat. Untuk lebih memahaminya di bawah ini disajikan beberapa pernyataan para ahli ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai kajian ilmu politik, seperti dikutip A. Hoogerwerf (1985:46) dalam bukunya *Politikologi*, antara lain:

- a. Kehidupan politik, menurut posisinya yang biasa, mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi kebijakan yang diterima secara sosial dan dari cara di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. (David Easton).
- b. Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan (Talcott Parson 1966:71-72).
- c. Yang diartikan dengan proses politik adalah suatu proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau pembentukan kekuasaan dalam suatu sistem politik baik yang terorganisir maupun tidak. (G. Kuypers 1973:164).

Pengambilan keputusan adalah proses memilih berdasarkan banyak alternatif yang berbeda. Studi ilmu politik, studi tentang pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa

² Muji Sutrisno, *op.cit*, hal. 150

pengambilan keputusan adalah pusat dari proses politik, terutama didasarkan pada fakta bahwa politik mewujudkan kekuasaan sebagai hasil dari pengambilan keputusan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan dan mengolah data yang didapatkan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara tatap muka langsung oleh informan yang dianggap kompeten dalam membantu menjawab masalah yang diteliti.³ Pendekatan kualitatif digunakan pada konteks ini penulis untuk memahami bagaimana relasi anggota DPRD dalam fraksi partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penulis berfokus pada subjek yang akan diteliti. Hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian seperti perilaku, tindakan yang dilakukannya, motivasi dan sikapnya secara menyeluruh pada situasi dan kondisi yang dialami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dilapangan seperti pengamatan yang dilakukan, hasil wawancara dengan informan, dan realitas sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dalam menjawab masalah yang diteliti seperti; data-data, buku dan dokumentasi mengenai penelitian yang dilakukan. Metode analisis dalam tulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian di olah dengan tiga tahap yaitu tahap pertama adalah mereduksi, setelah data direduksi kemudian menyajikan data tersebut. Setelah data disajikan, proses akhir adalah menarik

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi anggota dalam fraksi Demokrat periode 2014-2019 kabupaten Parigi Moutong di mulai sejak hasil pemilihan legislatif 2014 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam penetapan itu, terdapat lima anggota legislatif berasal dari partai Demokrat yang kemudian membentuk sebuah fraksi yaitu fraksi Demokrat DPRD kabupaten Parigi Moutong. Pada awal terbentuknya fraksi demokrat di ketuai oleh Abdul Haris Lasimpara.

Peran fraksi dalam DPRD sangatlah penting. Konflik-konflik yang terjadi di dalam internal fraksi harusnya di minimalisir agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Adanya konflik internal yang terjadi di dalam fraksi partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong mencerminkan bahwa dalam pembentukan sebuah fraksi di DPRD tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Konflik tersebut terjadi karena adanya konflik internal dalam partai Demokrat menjelang pemilihan Kepala Daerah kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 kemudian berimbas pada relasi antar anggota dalam fraksi. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong bapak H. Suardi dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Sempat memanas karena pemberhentian Pak Haris secara mendadak tanpa pemberitahuan. Pak Haris tidak lagi memperjuangkan kepentingan partai dalam fraksi sehingga banyak konstituen partai Demokrat tidak tersalurkan aspirasinya. Efeknya berdampak pada pemilihan legislatif 2019. Karena banyak

³ Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.166.

konstituen demokrat merasa tidak diperhatikan dan diperjuangkan aspirasinya sehingga pada pemilihan 2019 lebih memilih calon legislatif dari partai lain.”⁴

Posisi bapak Haris Lasimpara sebagai ketua fraksi partai Demokrat di DPRD kabupaten Parigi Moutong sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi fraksi. Fraksi yang dinilai sangat penting karena perpanjangan dari partai politik tentunya selain memperjuangkan aspirasi rakyat, juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai. Jika terjadi konflik dalam internal fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka akan terlihat bahwa peran partai politik akan tidak jelas. Posisi fraksi memperkuat posisi Partai Politik dalam mengendalikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak disiplin dan dapat diawasi dan dikontrol oleh Partai Politik.

Hal yang sama disampaikan oleh staf fraksi partai Demokrat DPRD kabupaten Parigi Moutong bahwa relasi antar anggota dalam fraksi partai Demokrat memang sempat memanas awal digantikannya bapak Haris Lasimpara sebagai ketua DPC.

“Memang diawal pergantian bapak Haris Lasimpara sebagai ketua DPC sempat memanas. Pada saat itu pak Haris merangkap ketua DPC sekaligus ketua DPRD periode 2014-2019. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah itu, relasi mereka cukup bagus karena mereka sudah terpilih selama 2 periode. Jadi mereka sudah tau satu sama lain.”⁵

Dari dua hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa relasi antar anggota fraksi

partai Demokrat di DPRD kabupaten Parigi Moutong awal digantikannya bapak Haris Lasimpara sebagai ketua DPC berdampak pada tidak harmonisnya komunikasi antar anggota fraksi. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi rakyat sedikit terhambat, apalagi konstituen partai Demokrat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota fraksi. Selain itu pasca pemilihan kepala daerah kabuapten Parigi Moutong tahun 2018, bupati yang terpilih bukan lagi usungan dari partai Demokrat. Sehingga dalam menyalurkan beberapa aspirasi khususnya di daerah konstituen partai Demokrat tidak terlalu diakomodir oleh bupati terpilih. Hal tersebut di ungkapkan oleh Adiyana selaku anggota legislatif DPRD kabupaten Parigi Moutong periode 2014-2019:

“Kalau mengenai hubungan dengan bupati terpilih, kita ketahui bahwa kita tidak harmonis. Sehingga kebijakan-kebijakan untuk konstituen demokrat berkurang. Seperti contoh, kita melakukan pengusulan pengaspalan di konstituen demokrat, itu tidak di kabulkan. Kita mengusulkan irigasi di daerah konstituen demokrat, juga tidak dikabulkan. Misalnya program pemberdayaan masyarakat di konstituen demokrat juga tidak dikabulkan. Itulah dampak dari pemilihan kepala daerah tahun 2018, sehingga kita dianggap oleh konstituen demokrat itu tidak bisa memenuhi aspirasi/ permintaan masyarakat. Dan berdampak pada pemilihan legislatif tahun 2019. Mereka lebih memilih calon legislatif dari partai lain daripada calon legislatif dari partai Demokrat.”⁶

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang berada di daerah dan pemegang amanah

⁴ Suardi, Sekretaris DPC Partai Demokrat kabupaten parigi Moutong, wawancara pada tanggal 17 April 2021, pukul 08.00 Wita.

⁵ Aslan Lahelo, Staf Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019, wawancara pada tanggal 15 April 2021, pukul 10.00 Wita.

⁶ Adiyana Janji, Anggota Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019, wawancara pada tanggal 12 April 2021, pukul 13.30 Wita.

konstituen. Konstituen merupakan masyarakat yang berada di daerah pemilihan dan tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap di komisi pemilihan umum. Namun jika kita berdasar pada nomnklatur Dewan Perwakilan Daerah, konstituen memiliki pengertian seluruh masyarakat di dapil masing-masing meskipun mereka tidak menggunakan hak pilihnya.⁷ Anggota dewan perwakilan rakyat daerah sudah seharusnya menjalin hubungan yang baik antara konstituen karena mereka adalah pengembalian amanah aspirasi masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pada pasal 71 huruf yang menyebutkan bahwa tugas wewenang dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun Daerah adalah untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Menurut Tata Tertib DPR 2009-2014 (www.dpr.go.id), aspirasi merupakan keinginan kuat masyarakat, yang dikomunikasikan kepada DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten dalam bentuk Pernyataan Sikap. DPR RI/DPRD Provinsi/Kabupaten Pendapat, keinginan, kritik, bahan, dan saran yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. Anggota DPRD dan pemilih memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Baik anggota DPRD sebagai penerima manfaat yang dilimpahkan maupun warga negara sebagai pelaksana, sama-sama

berkontribusi terhadap terwujudnya demokrasi di Indonesia.⁸

Keterwakilan menurut Arinanto dan Fatmawati merupakan keterwakilan baik secara formal ataupun secara substantif. Yang dimaksud dengan keterwakilan secara formal adalah kehadiran secara fisik anggota DPRD di parlemen sedangkan keterwakilan substantif merupakan perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Arinanto dan Fatmawati pun menjelaskan bahwa secara substansial keterwakilan rakyat dapat tersalurkan apabila nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan atau bahkan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh DPR.⁹

Maka dari itu, sudah sepantasnya jika eksekutif dan legislatif dalam membuat sebuah aturan tidak lagi memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu tetapi mereka bekerja atas nama rakyat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adanya konflik internal yang terjadi di dalam fraksi partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong mencerminkan bahwa dalam pembentukan sebuah fraksi di DPRD tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Konflik tersebut terjadi karena adanya konflik internal dalam partai Demokrat menjelang pemilihan Kepala Daerah kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 kemudian berimbas pada relasi antar anggota dalam fraksi. Relasi antar anggota fraksi partai Demokrat di DPRD kabupaten Parigi Moutong awal digatikannya bapak Haris Lasimpara sebagai ketua DPC berdampak pada tidak harmonisnya komunikasi antar anggota fraksi. Sehingga

⁷ Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalinkan Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP. Hlm. 3

⁸ Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalinkan Hubungan Konstituen dan

Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP. Hlm. 3

⁹ Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalinkan Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP. Hlm. 3

dalam menyalurkan aspirasi rakyat sedikit terhambat, apalagi konstituen partai Demokrat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota fraksi. Selain itu pasca pemilihan kepala daerah kabuapten Parigi Moutong tahun 2018, bupati yang terpilih bukan lagi usungan dari partai Demokrat. Sehingga dalam menyalurkan beberapa aspirasi khususnya di daerah konstituen partai Demokrat tidak terlalu diakomodir oleh bupati terpilih.

Persantunan

Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. dan Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku pembimbing tesis dan penulisan jurnal ini. Jurnal ini merupakan bagian dari tesis saya di Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin sehingga terdapat beberapa kesamaan data. Data yang didapatkan merupakan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Parigi Moutong dan dikantor partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Aditiyawarman. (2019). Peran Fraksi dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4 (2), 12-19.
- Bagong Suyanto. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, hlm. 166.
- Khoirunnisa, Anin. (2015). Relasi Kekuasaan di Kalangan Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019. *Jurnal Departemen Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Martono, Nanang. (1981). *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martua Pahalaning Wandalibrata. (2019). *Kajian Metafisika "Relasi Kuasa"*

Dalam Pemikiran Michel Foucault. *Jurnal Cakrawarti*, 02 (01).

- Muji Sutrisno & Hendar Purtanto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Muji & Hendra Purtanto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Adiyana Janji. Anggota Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019, wawancara pada tanggal 12 April 2021, pukul 13.30 Wita.
- Aslan Lahelo, Staf Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019, wawancara pada tanggal 15 April 2021, pukul 10.00 Wita.
- Suardi, Sekretaris DPC Partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong, wawancara pada tanggal 17 April 2021, pukul 08.00 Wita.